

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Bappebti Tekan Kasus Investasi



Foto : Mendag, Gita Wirjawan mengunjungi kantor Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan juga memberi pengarahannya kepada pegawai Bappebti.

Kementerian Perdagangan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Agung tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi para pejabat Kemendag dalam mengambil berbagai langkah kebijakan.

Tentunya, dengan adanya kesepakatan bersama ini maka akan dapat memperkuat fungsi bantuan hukum yang telah lama dilaksanakan secara internal melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendag dan yang terkait dengan pengawasan perdagangan berjangka komoditi oleh Biro Hukum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

“Bappebti sangat banyak berhubungan dengan pelaku usaha dan masyarakat terkait dengan kebijakannya. Karena itu, kalau ada gugatan perdata dari pelaku usaha atau pun masyarakat, Bappebti akan meminta bantuan kepada Kejaksaan dan mereka akan bertindak sebagai pengacaranya Bappebti,” ujar Kepala Biro Hukum, Bappebti, Sri Haryati.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, pada edisi ini Redaksi menyajikannya secara lengkap sebagai menu utama. Dan, pembaca dapat lebih memahami pentingnya kerjasama yang dilakukan antara Kemendag dengan Kejaksaan, khususnya dalam hal ini yakni kerjasama yang dilakukan Bappebti dengan aparat penegak hukum di Indonesia.

Tak kalah menarik, Redaksi juga memberikan laporan kunjungan Plh. Kepala Bappebti Nus Nuzulia Ishak bersama jajarannya ke Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indone-

sia (BKDI) pada 29 Mei 2013 lalu. Kunjungan tersebut sebagai bentuk komitmen Bappebti di tahun 2013 untuk mendorong meningkatnya transaksi kontrak berjangka multilateral dari minimum 5 % pada tahun 2012 menjadi 30 % di tahun 2013.

“JFX dan BKDI sudah komit untuk meningkatkan kontrak multilateral hingga 30 % di tahun 2013. Tadi kami sudah diskusi terkait apa saja yang akan dilakukan kedua bursa tersebut, jadi kita tunggu saja implementasinya,” ungkap Nus Nuzulia Ishak.

Kabar lainnya, kami juga menyuguhkan liputan tentang gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Barito Kuala. Ternyata, Kabupaten ini merupakan sentra produksi padi terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam implementasinya, gudang SRG tersebut dinilai cukup membanggakan dan kiranya dapat menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Sebagai inspirasi, kami juga mengajak pembaca menyusuri pasar lelang bunga yang diselenggarakan Flora Holland Auction (FHA) yang berada di Negeri Belanda. Untuk diketahui, pasar lelang bunga ini merupakan salah satu pasar lelang tertua di dunia dan memiliki mekanisme perdagangan yang efisien untuk meningkatkan volume transaksi.

Selain laporan-laporan yang telah kami sebutkan di atas, tentunya Redaksi juga menyajikan laporan lain yang bermanfaat. Akhir kata, semoga edisi kali ini tetap berkesan di hati pembaca.

Salam!

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

KONTRAK
BERJANGKA
MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab

Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi

Robert J. Bintaryo

Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

Dewan Redaksi

Pantas Lumban Batu, Agus
Muharni S., Harry Prihatmoko,
Diah Sandita Arisanti, Poppy
Juliyanti, Erni Artati, Sri
Haryati.

Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin, Umar
Hasan.

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat
Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel
ataupun opini dikirim lengkap
dengan identitas serta foto ke

E-mail:
buletin@bappebti.go.id



Berita Utama.....4-7

- Bappebti Tekan Kasus Investasi
- Kejagung 'Lindungi' Pejabat Kemendag
- Inspeksi Bursa Berjangka

Berjangka.....8-10

- Gudang SRG di Lumbung Padi Kalsel
- Kontrak Kerja Multilateral Menanjak

Pasar Lelang.....12-13

- Denyut Flora Holland Auction di PLKA
- Info PLKA Acuan Harga Komoditi

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- 2013 Ditaregtkan Berdiri 6 JFX Corner
- Duet Deddy-Sherman Janjikan Perubahan JFX
- 'Duo Sri' Bappebti Dilantik Mendag
- JFX Tambah Produk Tingkatkan Likuiditas

Analisa.....19

Breaknews.....20

Info SRG.....20-21

Kolom.....24-25

- Hedging Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi

Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-resiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

Resi Gudang...11

Potret SRG
di Mata TPID



Wawasan...22-23

Sistem Resi Gudang
di Negara Berkembang



Kiprah...26-27

Mengabdikan Bersama
Gerakan SRG Rumput Laut





Bappebti Tekan Kasus Investasi



Selain membentengi diri dari gugatan masyarakat, Bappebti juga menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi.



Kelapa Biro Hukum, Bappebti, Sri Haryati

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan seperti diamanatkan Undang-undang No. 32 Tahun 1997, yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 2011, tentang perdagangan berjangka komoditi, merupakan

salah satu lembaga yang berpotensi digugat pelaku usaha industri perdagangan berjangka komoditi. Terkait itu, Kementerian Perdagangan melalui Biro Hukum, Sekretariat Kementerian Perdagangan, melakukan kerjasama dengan Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Agung. Kerjasama itu juga mencakup penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

Kelapa Biro Hukum, Bappebti, Sri Haryati, mengatakan, Bappebti sebagai lembaga negara tidak terbebas sama sekali dengan masalah keperdataan. Karena itu, kerjasama Kemendag dengan Kejaksaan Agung akan memberi rasa nyaman kepada pejabat dalam memutuskan kebijakannya.

“Bappebti seperti diamanatkan oleh undang-undang sangat banyak berhubungan dengan pelaku usaha dan masyarakat terkait dengan kebijakannya. Karena itu sangat memungkinkan digugat oleh masyarakat. Sebab itu, kerjasama dengan Kejaksaan akan memberi rasa nyaman,” katanya.

“Jadi kalau ada gugatan perdata dari pelaku usaha atau pun masyarakat, Bappebti akan meminta bantuan kepada Ke-

jagung dan mereka akan bertindak sebagai pengacaranya Bappebti,” jelasnya.

Lebih jauh diutarakan Sri Haryati, kerjasama di bidang keperdataan itu juga merupakan bagian dari penegakan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi. Sebelumnya, Bappebti juga sudah melakukan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum lainnya. Seperti, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kemenkoinfo dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kerjasama dengan KPK memang belum direalisasikan. Tetapi draft kerjasama dari Bappebti sudah disampaikan kepada KPK, mungkin mereka masih mempelajarinya,” kata Sri.

Sementara itu, penegakan hukum antara Bappebti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dilakukan secara bilateral. Namun, kedua lembaga sudah berkoordinasi di bawah wadah Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari Kepolisian, PPATK, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam-LK, Kemenkop dan UKM, Bappebti dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag.

“Karena kita diwadah Satgas Waspa-



da Investasi, dan sudah sering berkoordinasi, Bappebti dengan OJK belum melakukan kerjasama. Dan menurut saya, kerjasama dengan OJK itu tidak perlu, karena dengan Satgas itu cakupannya lebih luas,” ujar Sri.

PPNS

Dalam kaitan penegakan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi, Bappebti juga melakukan kerjasama dengan Dinas Perdagangan dari sebanyak tujuh provinsi. Yakni masing-masing dari Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kerjasama itu dilakukan dengan mengangkat sebanyak dua orang dari masing-masing Dinas Perdagangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diperbantukan kepada Bappebti.

“PPNS yang diperbantukan itu nantinya akan menjadi wakil Bappebti di masing-masing daerahnya jika ada permasalahan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Step pertama yang turun melakukan penyidikan jika ada permasalahan di bidang perdagangan berjangka yakni PPNS itu. Atau pun, mereka memberikan informasi kepada Bappebti terkait penanganan dan penegakan hukum di daerahnya,” ungkap Sri.

Sebab itu, tambah Sri, mereka pun sudah dilatih dan dibekali pengetahuan terkait dengan berbagai peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Pengangkatan PPNS yang diperbantukan kepada Bappebti itu merupakan terobosan penegakan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi. Dan sebelum PPNS itu diangkat oleh Bappebti, Kementerian Hukum dan HAM telah memberi dukungan dan saran.

“Kami mengangkat PPNS itu berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Mereka juga yang menentukan syarat-syarat pegawai daerah yang bisa menjadi PPNS. Seperti, sudah diangkat minimal dua tahun sebagai PNS dan bekerja di biro teknis- bidang perdagangan dalam negeri,” terang Sri.

Menurut Sri Haryati, penetapan 14 orang PPNS yang diperbantukan kepada Bappebti itu adalah tahap awal dari program pembentukan PPNS di bi-

“

Turunnya jumlah pengaduan baru menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat sudah mulai memahami risiko dan manfaat instrumen perdagangan berjangka komoditi

”

dang perdagangan berjangka di masing-masing daerah. Hal itu juga dilandasi tingginya praktik perdagangan berjangka ilegal di masing-masing daerah bersangkutan.

“Sebelum kami menentukan tujuh daerah itu, Bappebti melakukan pemetaan di daerah mana saja tingkat kasus di bidang perdagangan berjangka yang tinggi. Hasilnya, adalah tujuh daerah tadi. Untuk selanjutnya, Bappebti juga akan melakukan program yang sama yakni mengangkat PPNS dari berbagai provinsi. Jadi nantinya akan ada PPNS bidang perdagangan berjangka komoditi di seluruh provinsi,” ujar Sri.

Kasus Lama

Berdasarkan data rekapitulasi pengaduan dan penanganan kasus di bidang perdagangan berjangka komoditi yang dilakukan Bappebti, hingga saat ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 lalu. Namun, pengaduan dan penanganan kasus tersebut berasal dari masyarakat yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Hingga saat ini, ada sebanyak 80 pengaduan dan kasus di bidang perdagangan berjangka komoditi yang ditangani Biro Hukum Bappebti. Sedangkan sepanjang tahun 2012 lalu, jumlahnya hanya mencapai 71 pengaduan.

“Memang saat ini ada peningkatan dari sisi jumlah pengaduan yang ditangani Biro Hukum. Tetapi pengaduan itu ada yang berasal dari kasus tahun

2010. Ketika kasus tersebut terungkap tahun 2010, si-investor tidak melakukan pengaduan dan baru melakukan pengaduan di tahun ini,” terang Sri.

Tetapi pada dasarnya jumlah kasus baru yang muncul ke Bappebti relatif turun dibandingkan tahun 2012. Dari sebanyak 80 pengaduan masyarakat itu, ada sebanyak 15 pengaduan yang berasal dari tahun 2012 dan bahkan dari tahun 2010.

“Turunnya jumlah pengaduan baru menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat sudah mulai memahami risiko dan manfaat instrumen perdagangan berjangka komoditi. Di samping itu, dengan keterbukaan informasi melalui media digital, masyarakat semakin teredukasi dan berhati-hati dari setiap penawaran investasi di bidang perdagangan berjangka,” ujar Sri Haryati.

Blacklist

Menekan tingkat penyalahgunaan wewenang para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi, Biro Hukum Bappebti saat ini tengah mengkaji ditayangkannya nama-nama oknum yang bermasalah di web Bappebti. Dasar pemikiran itu agar setiap pihak berhati-hati dan bertanggungjawab atas tindakannya.

“Kami sedang mengkaji ditayangkannya di web Bappebti nama-nama yang bermasalah di bidang perdagangan berjangka baik dari kalangan pialang maupun marketing. Hal yang sama juga dilakukan Bank Indonesia, ketika memiliki masalah terhadap perbankan nama nasabah tercantum di-list Bank Indonesia,” jelas Sri.

Dengan demikian, masyarakat pun akan berhati-hati berhadapan dengan oknum bermasalah tersebut. Ini juga bisa dikategorikan sebagai sanksi sosial, tambahnya.

“Selama ini sudah cukup banyak Wakil Pialang Berjangka yang memiliki masalah terhadap masyarakat, tetapi mereka seolah-olah tidak bersalah setelah melarikan dana nasabah. Sehingga dengan dicantumkannya nama yang bermasalah di web Bappebti, diharapkan tindakan malpraktik akan menurun. Tetapi, sekali lagi hal itu masih gagasan yang masih dikaji,” imbuh Sri Haryati. ▲



Sekjen Kemendag, Gunaryo berjabat tangan dengan Jaksa Agung Muda, Burhanuddin usai penandatanganan kesepakatan kerjasama kedua lembaga.

Kemendag vs Kejagung Kerjasama Atasi Kasus PBK

Perkembangan dunia usaha yang didorong dari berbagai kebijakan bukan tidak mungkin mendatangkan gugatan kepada pejabat Kementerian Perdagangan. Untuk itu, Kejaksaan Agung bertindak sebagai pengacara Kementerian Perdagangan.

Mengantisipasi datangnya gugatan perdata dan tata usaha negara dari berbagai kebijakan yang diterbitkan berbagai pejabat Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan melakukan Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Agung. Kerjasama itu juga mencakup penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

Di samping itu, ruang lingkup Kesepakatan Bersama tersebut juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan perkara, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemberian legal opinion.

“Spirit kerjasama dua lembaga tersebut adalah untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi para pejabat Kementerian Perdagangan dalam mengambil berbagai langkah kebijakan,” jelas Sekjen Kemendag, Gunaryo, disela-sela penandatanganan nota kesepahaman tersebut, pada 8 Mei 2013, di Kementerian Perda-

gangan, Jakarta.

Sementara itu, dari pihak Kejaksaan Agung yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman itu diwakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Burhanuddin

Lebih jauh diutarakan Gunaryo, Sekjen berharap bahwa dengan adanya kesepakatan bersama itu akan dapat memperkuat fungsi bantuan hukum yang telah lama dilaksanakan secara internal melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Dan juga terkait dengan pengawasan perdagangan berjangka komoditi oleh Biro Hukum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kejaksaan adalah penegak hukum yang juga mempunyai fungsi sebagai Pengacara Negara, sebab itu Kementerian Perdagangan berharap agar Kejaksaan Agung dapat memberikan bantuan hukum bagi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Kerjasama ini tidak diperuntukkan bagi perkara

yang masuk dalam ranah hukum pidana.

“Kami ingin menggandeng Kejaksaan Agung untuk dapat melakukan perannya sebagai Pengacara Negara dalam hal Kementerian Perdagangan mengalami gugatan yang bersifat perdata maupun tata usaha negara”, ujar Gunaryo.

Berdasarkan catatan Biro Hukum Kemendag, sejak tahun 2010 hingga saat ini, Biro Hukum telah dan sedang menangani 8 kasus di bidang perdata dan 5 kasus di bidang tata usaha negara atau jika dibuatkan rata-rata menangani 4 kasus pertahun. Dari kasus-kasus tersebut sebagian besar dimenangkan oleh Kementerian Perdagangan.

“Jadi, kerjasama dua lembaga negara ini adalah mengantisipasi adanya perkara atau pun gugatan baru di masa yang akan datang yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan. Maka sudah tepat jika Kementerian Perdagangan mengambil inisiatif untuk membuat Kesepakatan Bersama ini,” kata Gunaryo. ▲



Inspeksi Bursa Berjangka



Plh. Kepala Bappebti, Nuzulia Ishak mengamati sistem perdagangan JFX & BKDI.



Bappebti dorong tercapainya target transaksi kontrak berjangka multilateral sebesar 30 %.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di tahun 2013 bertekad mendorong untuk meningkatkan transaksi kontrak berjangka multilateral dari minimum 5 % pada tahun 2012 menjadi 30 % di tahun 2013. Maka, untuk memastikan kesiapan dua bursa komoditi dalam meningkatkan target transaksi multilateral menjadi 30 % tersebut, Plh. Kepala Bappebti Nus Nuzulia Ishak bersama Kepala Biro Perniagaan Bappebti Sri Nastiti Budianti dan Kepala Biro Analisis Pasar Bappebti Mardjoko, mengunjungi Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) pada 29 Mei 2013 lalu.

Kesimpulannya, dua bursa itu siap untuk meningkatkan kontrak multilateral hingga 30 % di tahun 2013. “JFX dan BKDI sudah komit untuk meningkatkan kontrak multilateral hingga 30 % di tahun 2013. Tadi kami sudah diskusi terkait apa saja yang akan dilakukan kedua bursa tersebut, jadi kita tunggu saja implementasinya,” tegas Nus Nuzulia Ishak se usai melakukan kunjungan.

Peningkatan volume transaksi itu selain dihasilkan dari kontrak berjangka yang sudah diperdagangkan, juga dari

kontrak berjangka yang bakal diluncurkan hingga akhir tahun 2103 nanti, tambah Nus.

Tak kalah penting, Nus juga mengharapkan, kedua bursa tersebut dapat berfungsi sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) dan sarana lindung nilai (*hedging*) sekaligus sebagai sarana referensi harga bagi para produsen dalam menetapkan harga jual produk komoditas ekspor.

Untuk diingat, peningkatan volume kontrak berjangka multilateral sebesar minimum 30 % merupakan arahan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan yang harus terealisasi pada tahun 2013 ini. “Jadi kami akan terus mengawal para pelaku usaha di industri perdagangan berjangka ini,” kata Nus.

Saat berada di gedung JFX, Nus juga meninjau ruangan sistem transaksi perdagangan berjangka elektronik (*War Room*) JFX. Dan dari penjelasan Direksi JFX, kata Nus, JFX saat ini menggunakan sistem perdagangan yang dinamakan JAFeTS 3, di mana sistem ini meliputi trading engine, surveillance dan risk management system. Sementara itu, di kantor BKDI, Nus Nuzulia juga memantau proses perdagangan di ruang Market Control Centre (MCC) BKDI.

Terkait agenda kunjungan tersebut, Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, mengatakan, JFX optimis perusahaan pialang dapat mencapai target transaksi kontrak multilateral yang sudah ditetapkan oleh Bappebti.

“Persoalannya adalah kemauan dari masing-masing perusahaan pialang berjangka. Karena, harus jujur diakui tidak semua perusahaan pialang berjangka menawarkan kontrak berjangka multilateral. Terutama di kantor cabang perusahaan pialang yang ada di daerah. Pada hal, kalau kita lihat, para pelaku komoditi itu ada di daerah baik sebagai pedagang komoditi maupun petaninya,” ungkap Bihar.

Sementara itu, Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja, menegaskan, BKDI pada tahun 2013 akan fokus mendukung kebijakan Bappebti yang menetapkan transaksi minimum kontrak multilateral sebesar 30%.

Walaupun, Megain mengakui, “target minimum 30 % volume transaksi multilateral itu bukanlah hal yang mudah dicapai oleh perusahaan pialang berjangka. Tapi, kami dengan dorongan Bappebti akan meningkatkan volume transaksi perusahaan pialang berjangka,” tegas Megain Widjaja. ▲



Gudang SRG di Lumbung Padi Kalsel

Debut gudang SRG di Batola sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Dan kini, petani setempat telah mengandalkan sistem penjualan gabah melalui skema SRG.



Adalah keputusan yang tepat menempatkan gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Barito Kuala. Pasaunya, kabupaten ini merupakan sentra produksi padi terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Tercatat, gudang Batola ini mulai beroperasi pada 10 Oktober 2010 dan diresmikan oleh Kementerian Perdagangan pada 17 Desember 2010 lalu.

Dalam implementasinya, gudang SRG yang terletak di Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana ini, dinilai cukup membanggakan. Mengapa?

Pada Mei tahun lalu, Bupati Batola, Hasanuddin Murad bersama Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin tampil memaparkan SRG Pada Rakornas III Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2012. Adapun materi yang disampaikan berjudul 'Manfaat dan Tantangan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Batola Propinsi Kalsel', dan subjudul 'Upaya meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Mendukung Stabilitas Harga Gabah'.

Tampilnya gubernur bersama bupati

Batola di hadapan gubernur, walikota/bupati dan ketua DPRD se Indonesia ini, menunjukkan keberhasilan Pemkab Batola dalam menjalankan SRG di Batola. Bukti lain keberhasilan implementasi SRG di Batola juga dapat dilihat dari penghargaan SRG Award dari Kementerian Perdagangan, pada September tahun 2012 lalu.

Rupanya, keberhasilan gudang SRG di Batola ini sampai 'ke telinga' Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, dan tertarik untuk melakukan peninjauan ke gudang SRG di Batola, Kalsel, pada 7 Mei 2013 lalu. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wamendag Bayu Krisnamurthi melakukan dialog langsung dengan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok tani setempat.

Dalam pemaparannya, Bayu mengatakan, pelaksanaan SRG telah memberikan manfaat serta mampu meningkatkan daya saing petani dan koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM). "Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah gabah yang disimpan di gudang, jumlah

Resi Gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang, serta kredit skema SRG yang diperoleh petani dengan tingkat tunggakan 0 %," ungkap Bayu Krisnamurthi.

Namun, secara umum, Bayu melihat, pelaksanaan SRG di daerah terkadang masih menghadapi berbagai tantangan yang menjadikan SRG sebagai tawaran kesempatan belum dioptimalkan.

Untuk itu, Bayu berharap, pemahaman dan dukungan antar pemerintah pusat, pemda, sektor swasta, serta pelaku usaha perlu ditingkatkan untuk membangun SRG yang berhasil guna. "Selain itu, Pengelola Gudang juga harus diberi pemahaman dan agar dapat menumbuhkembangkan SRG di daerahnya," tandasnya.

Dukungan Bupati

Pendirian gudang SRG di Batola didasari adanya permasalahan komoditi pertanian yang berumur terbatas dan panen pada waktu tertentu, sehingga memicu fluktuasi harga (rendah pada musim panen, tinggi saat musim tanam).

Selain itu, akses petani masih lemah pada sumber pembiayaan akibat tidak ada jaminan kredit dan pengembalian pinjaman yang sangat tinggi sehingga memicu tengkulak. Adapun manfaat keberadaan gudang SRG membuat harga lebih baik karena menunda penjualan, adanya kepastian kualitas dan kuantitas barang yang disimpan, serta mendapatkan jaminan keamanan (asuransi), dan mendapatkan pembiayaan tepat dan murah serta mendorong berusaha secara kelompok.

Gudang SRG di Kabupaten Batola mulai beroperasi pada 2010. Dalam periode Oktober hingga Desember 2010, tercatat tersimpan gabah di gu-



dang sebanyak 104.548 ton untuk 17 lembar resi gudang. Nilai kredit resi yang dikeluarkan mencapai Rp 163 juta.

Sebagai ilustrasi, saat petani memasukkan padi ke gudang SRG harga gabah Rp 5.000 per kg, setelah disimpan tiga bulan maka harga gabah menjadi Rp 7.000 per kg. Dalam periode Agustus hingga Desember 2011, gabah yang ada di gudang sebanyak 262.921 ton untuk 26 lembar resi. Kredit yang disalurkan sebesar Rp 350 juta. Nah, dari angka di atas sangat jelas, adanya gudang SRG sangat menguntungkan petani.

“Skema SRG di Batola digagas dan didukung langsung oleh Bupati Batola sejak awal masa jabatannya. Dan itu menjadi satu dari implementasi visi dan misi Pemkab Batola,” tutur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi UKM (Kadis Perindagkop dan UKM) Batola, M. Hasbi.

SRG, jelas Hasbi, sangat banyak manfaatnya bagi para petani. Diantaranya, memperkecil fluktuasi harga, di mana petani tidak perlu menjual barangnya segera setelah panen yang biasanya harganya sangat rendah. “Petani juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit dari perbankan, karena Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit.”

Sejak Pemerintah Kab. Batola menerapkan SRG tiga tahun lalu, kata Hasbi, hingga kini tercatat ada 26 kelompok tani dan koperasi yang memanfaatkan resi gudang dalam penjualan gabah mereka. “Sebagian besar petani di Batola kini mengandalkan sistem penjualan gabah melalui SRG,” tandasnya.

Tak heran, akhirnya Bupati Batola, Hasanuddin Murad mendapatkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara

(APN) tahun 2012 dari Presiden Susilo Bambang Yodhoyono. Penghargaan ini diberikan kepada Hasanuddin atas keberhasilannya dalam meningkatkan produksi pangan. Diantaranya, padi 5,1 %, sapi potong 11,7 %, ayam pedaging 5,7 %, dan ikan 6,3 %. Selain itu, Hasanuddin yakni mampu mengembangkan SRG dengan jumlah padi yang disimpan 252.921 kg dan nilai kredit sebesar Rp 350 juta serta mengembangkan kredit pupuk bersubsidi tanpa bunga sebesar Rp 11 milyar.

Lumbung Padi

Kabupaten Barito Kuala (Batola) merupakan penyangga ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Batola juga terkenal sebagai lumbung padi Kalsel karena dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, penyumbang produksi padi terbesar yakni Kabupaten Batola capai 17,53 %, Kabupaten Tapin 13,73 %, dan Kabupaten Banjar 13,65 %.

Hampir semua kecamatan di Kab. Batola merupakan sentra produksi padi sawah kecuali Kecamatan Kuripan. Yang memberikan kontribusi produksi padi terbesar adalah Kecamatan Tabunganen (13,76 %), Anjir Pasar (8,99 %), Rantau Badauh (8,71 %) dan Anjir Muara (8,08 %). Sedangkan kecamatan lainnya Tamban (7,84 %), Barambai (7,41 %), Mekarsari (7,23 %), Cerbon (5,32 %), Tabukan (5,24 %), Belawang (4,70 %), Marabahan (4,44 %), Alalak (4,41 %), Mandastana (4,38 %), Bakumpai (4,08 %), Wanaraya (2,91 %), Jejangkit (2,46 %), dan Kuripan (0,04 %).

Tercatat di tahun 2009, Batola menghasilkan produksi gabah ke-

ring giling sekitar 317.605 ton. Di tahun 2010 luas tanam mencapai 98.356 ha dengan luas panen 95.104 ha dan produksi padi 329,089 ton atau rata-rata 34,6 kwintal/ha. Pada tahun 2011 luas tanam mencapai 95.348 ha dengan luas panen 92.152 ha dan produksi padi 342,869 atau rata-rata 37,21 kwintal/ha.

Dengan data tersebut, harus diakui produksi padi di Batola terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Bupati Batola, Hasanuddin Murad, dalam penerapan pertanian dirinya melakukan berbagai program. Diantaranya, pengembangan kawasan, pemberian pinjaman, penebusan pupuk bersubsidi, pengadaan alat dan mesin pertanian, pengembangan varietas unggul, pengembangan kluster padi, SRG, dan pengembangan infrastruktur.

Dalam menunjang aksebilitas pangan, kata Hasanuddin, dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, pemberian bantuan peralatan mesin pertanian, penyediaan armada perdesaan, serta menjaga stabilitas harga dengan menumbuhkembangkan kelompok lumbung pangan serta membangun pengelolaan gudang komoditi.

“Intinya, pembangunan ketahanan pangan di Batola diarahkan pada peningkatan dan pembangunan akses distribusi yang dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan modal kelompok lumbung pangan (KLP) dan meningkatkan penerapan SRG, sehingga stabilitasi harga dan pasokan pangan dapat terjaga dengan baik,” tandas Hasanuddin Murad. ▲



Kinerja Kontrak Multilateral Menanjak

Total volume transaksi multilateral pada bulan April 2013 di bursa komoditi tanah air kian meningkat. Seberapa besarkah?

Kuartal pertama tahun 2013 tampaknya memberi harapan besar terhadap target peningkatan kontrak berjangka multilateral, seperti yang ditetapkan otoritas perdagangan berjangka komoditi sebesar 30 %. Kinerja kontrak berjangka multilateral dari dua bursa berjangka itu dapat digambarkan dari kinerja periode April 2013 lalu, seperti Jakarta Futures Exchange (JFX) mencapai 95,11 % atau mencapai 42.654 lot dibandingkan periode Maret yang hanya mencapai 21.861 lot.

Peningkatan volume transaksi kontrak multilateral JFX masing-masing disumbangkan dari transaksi kontrak

berjangka kakao (satuan 5 ton) atau CC5 yang mencapai 4.223 lot, kontrak berjangka emas (satuan 1 kg) atau GOL 3.390 lot, kontrak berjangka emas (satuan 100 gr) atau GOL100 capai 1.195 lot dan kontrak berjangka emas (satuan 250 gr) atau GOL250 capai 4.187 lot.

Untuk kontrak gulir emas dalam US\$ Mini (satuan 10 troy ounce) atau GU1TF 20.239 lot, kontrak gulir emas dalam US\$ fixed rate (satuan 100 troy ounce) atau GU1H10 capai 24 lot. Dan, kontrak gulir emas dalam Rupiah (satuan 1000 gr) atau KGE 524 lot.

Sedangkan kontrak gulir emas dalam US\$ (satuan 100 troy ounce) atau KGEUSD capai 733 lot, kontrak gulir in-

deks emas (satuan Rp 10.000,-/angka indeks) atau KIE 410 lot, kontrak berjangka olein (satuan 20 ton) atau OLE 4745 lot. Dan, kontrak berjangka olein (satuan 10 ton) atau OLE10 sebesar 2984 lot.

BKDI Naik 23 %

Di pihak lain, Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI), kinerja volume transaksi multilateral pada bulan April 2013 sebesar naik sebesar 23 % dari periode Maret 2013 menjadi 87.245 lot. Transaksi BKDI didorong peningkatan transaksi kontrak berjangka emas dalam satuan 100 gram per lot dan dalam mata uang rupiah atau GOLDGR mencapai 9.188 lot. Untuk kontrak tunda serah emas 10 troy ounce per lot dan dalam mata uang USD atau GOLDUD sebesar 8.321 lot.

Sementara itu, volume kontrak tunda serah emas 10 troy ounce per lot dan dalam mata uang USD, dan dengan kurs rate yang sudah ditetapkan (Fixed Rate) USD 1 = IDR 10.000 atau GOLD-ID mencapai 129 lot. Sedangkan kontrak berjangka crude palm oil (CPO) 10 metric ton (10,000 kg per lot) dan dalam mata uang Rupiah atau CPOTR membukukan transaksi 69.409 lot.

Untuk kontrak berjangka RBD palm OLEIN 10 metric ton (10,000 kg/Lot) dan dalam mata uang Rupiah atau OLEINTR mencapai 198 lot. Dan, kontrak fisik timah 5 metric ton (5000 kg/Lot) dan dalam mata uang USD atau INATIN tidak ada transaksi alias nol.

Sedangkan kontrak berjangka komoditi yang disalurkan ke bursa luar negeri dengan skema perdagangan amanat luar negeri (PALN) mencapai 38 lot. Adapun untuk kontrak contract for difference (CFD) produk-produk stock mencapai 3.175.737,0 lembar dan non-stock mencapai 111.996,4 lembar. ▲

Volume Transaksi Multilateral JFX

No	Contract	April 2013				Total
		M1	M2	M3	M4	
1	CC5	1117	1165	1016	925	4223
2	GOL	692	1005	902	791	3390
3	GOL100	6	16	265	908	1195
4	GOL250	943	1246	922	1076	4187
5	GU1H10	0	2	15	7	24
6	GU1TF	3547	2898	12002	1792	20239
7	KGE	0	132	0	392	524
8	KGEUSD	19	422	292	0	733
9	KIE	0	10	0	400	410
10	OLE	714	1308	1499	1224	4745
11	OLE10	372	748	885	979	2984

Volume Transaksi CFD- BKDI

DATE	CFD	
	NON STOCK	STOCK
Jan-13	34,560.6	145,668.0
Feb-13	53,220.4	563,013.0
Mar-13	106,959.8	2,084,925.0
Apr-13	111,996.4	3,175,737.0

Potret SRG di Mata TPID

Implementasi SRG di berbagai daerah sudah berjalan ke arah yang positif

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. Sebabnya, harga komoditas pangan berpengaruh sebesar 60 % terhadap tingkat inflasi nasional. Untuk itu, pengembangan SRG di berbagai daerah diharapkan dapat mengendalikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan sehingga tingkat inflasi bisa tetap terjaga.

Terkait itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari Bank Indonesia melihat bagaimana implementasi SRG diberbagai daerah. Dan dalam penjelasan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, mewakili Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID), menilai, implementasi SRG di berbagai daerah dinilai sudah berjalan ke arah yang positif.

“SRG yang menjadi piranti untuk menjaga stabilitas harga di berbagai wilayah yang menjadi sentra pangan telah berjalan ke arah yang positif,” kata Darmin Nasution, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID keempat, di Jakarta, 8 Mei 2013 lalu.

Selama ini, SRG menjadi salah satu pilar utama yang terus dikembangkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan sebagai instrumen pembiayaan perdagangan, karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan komoditi yang disimpan di gudang.

Dengan skema SRG, kelompok tani dan UKM yang sering mendapat kendala pembiayaan, akan mendapatkan solusi alternatif pembiayaan atau kredit dari perbankan, karena Resi Gudang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit.

Adapun pelaksanaan SRG sudah dilakukan baik di gudang yang telah dibangun pemerintah maupun milik swasta. Sejak diluncurkan pada tahun 2008, SRG sudah dilaksanakan di 39 kabupaten/kota.



Peran Pemda

Dengan demikian, kata Darmin, penerapan SRG menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan daerah di tengah masih tingginya ketergantungan produksi pangan pada faktor musim. “Pola produksi yang masih sangat tergantung pada faktor musim akan berdampak pada pergerakan harga pangan yang diwarnai tekanan pada masa paceklik.”

Kondisi ini juga turut berpengaruh pada pendapatan petani yang tidak optimal pada masa panen raya. Namun, petani juga tidak dapat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga pada masa paceklik.

Dalam kaitan ini, papar Darmin, SRG menjadi suatu solusi yang dapat mendorong terjaganya kesinambungan pasokan pangan sepanjang tahun bagi masyarakat dan juga memperbaiki pendapatan petani.

“Namun, tantangan tetap ada dan akan semakin kompleks sehingga perlu kerja sama dan komitmen dengan Pemda,” kata Darmin.

Di sisi lain, dalam Rakornas yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono tersebut, Darmin juga memaparkan,

hingga saat ini TPID telah terbentuk di seluruh provinsi. Sementara pada tingkat kabupaten/kota, TPID telah terbentuk di 53 kota dari 66 kota yang merupakan basis penghitungan inflasi oleh BPS. Jumlah TPID tersebut bertambah dari tahun lalu yang berjumlah 44 TPID.

Kesadaran Pemda akan pentingnya menjaga stabilitas harga dan manfaat koordinasi dalam wadah TPID, telah mendorong 9 (sembilan) kabupaten/kota yang bukan merupakan basis penghitungan inflasi IHK nasional untuk turut membentuk TPID, yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Barito Selatan.

“Ke depan, dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027 tahun 2013, TPID akan berada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sehingga peran TPID akan semakin strategis terutama dalam upaya pengembangan ekonomi domestik dan stabilitas harga yang mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional,” tutup Darmin Nasution. ▲



Denyut Flora Holland Auction di PLKA

Flora Holland Auction- pasar lelang bunga di negeri Belanda ini merupakan salah satu pasar lelang tertua di dunia, dan memiliki mekanisme perdagangan yang efisien tingkatan volume transaksi.



Mekanisme transaksi pasar lelang bunga yang diselenggarakan Flora Holland Auction (FHA) yang berada di Negeri Belanda, agaknya dapat diterapkan dalam peningkatan transaksi pasar lelang komoditi agro (PLKA) yang diselenggarakan di tanah air. Dalam penyelenggaraan pasar lelang FHA, komoditi dari para peserta sebelumnya didaftarkan kepada penyelenggara dan pihak penyelenggara akan memberi informasi kepada peserta pembeli.

Mekanisme lelang yang dilakukan FHA selain lebih efisien karena peserta penjual tidak perlu membawa barang ke lokasi pasar lelang. Dan juga, para pembeli setiap saat dapat mengakses penyelenggaraan pasar lelang yang diselenggarakan secara online.

"Kami beberapa waktu lalu sudah mengamati pasar lelang bunga yang diselenggarakan Flora Holland Auction dan Aalsmeer Flower Auction di Belanda. Dan tampaknya, mekanisme lelang yang diselenggarakan Flora Holland Auction bisa kita terapkan di Indonesia untuk meningkatkan nilai transaksi pasar lelang," jelas Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Ismadjaja Toengkagie.

Lebih jauh dikatakan Ismadjaja, mekanisme pasar lelang FHA itu berpeluang diadopsi menjadi peraturan tata tertib penyelenggaraan pasar lelang di tanah air. "Kebetulan Bappebti saat ini sedang melakukan proses penyusunan

peraturan tata tertib pasar lelang. Jadi mekanisme transaksi Flora Holland Auction kemungkinan akan kita adopsi."

"Mekanisme Flora Holland Auction itu sangat memungkinkan diadopsi mengingat demografi Indonesia yang begitu luas, sehingga para penjual tidak harus membawa komoditi yang akan dilelang tetapi cukup didaftarkan," jelasnya.

Dalam kunjungan Ismadjaja Toengkagie di Belanda, juga didampingi Kabag Pengawasan Pasar Lelang Bappebti, Pantas Lumban Batu. Dan selama berada di Belanda, 20-25 Mei 2013, lalu, juga mengunjungi pasar lelang bunga Aalsmeer Flower Auctions (AFA).

Kunjungan Tim Bappebti ke AFA, diterima Jose Hougee, Humand Resoces Development, Aalsmeer Flower Auction, dan dalam penjelasannya dikatakan, AFA adalah pasar lelang bunga terbesar di dunia. Selain memiliki bangunan yang luas, letaknya juga strategis dekat dengan Bandar Udara Schipol. Sehingga bunga yang akan diekspor dapat dikirim dengan cepat ke seluruh dunia.

Efisien

Melalui pertimbangan efisiensi bisnis, per 1 Januari 2008 lalu, para anggota AFA dimerges dengan FHA. Pertimbangan lain karena Anggota AFA juga adalah Anggota FHA.

FHA adalah organisasi berbentuk koperasi dari para petani hortikultura di

Belanda. Sebagai organisasi penjualan hasil perkebunan bunga dari para anggota koperasi. Management HFA berprinsip untuk mengembangkan pasar lelang tersebut dengan fokus pada pencapaian hasil yang maksimal bagi anggota dengan berkontribusi terhadap pendapatan yang bersumber dari volume penjualan yang tinggi dengan biaya penjualan yang rendah.

Sedangkan misi merger dua pasar lelang itu ditujukan untuk meningkatkan posisi pasar dengan memperluas jaringan layanan internasional, menambah nilai dan memperkuat kualitas serta memperkuat posisi perdagangan hortikultura yang berasal dari Belanda masuk pasar Internasional.

Hingga saat ini pasar lelang bunga di Belanda terdapat di beberapa tempat seperti pasar lelang Aalmeer, di Naaldwijk dan Rijnsburg. Pasar lelang bunga itu ditujukan untuk pasar ekspor. Selain itu, pada pasar lelang Bleiswijk dan Eelde. Kedua pasar lelang itu difokuskan untuk pasar domestik. Sedangkan pasar lelang di Jilbab Rhein-Maas adalah kolaborasi pasar bunga Flora Holland dengan Landgard yang disediakan untuk ekspor maupun domestik.

Sementara itu, mekanisme pelaksanaan lelang bunga di FHA menjadikan para petani menjadi Anggota Penjual yang ingin menjual bunga hasil panennya dan sebelum di lelang peserta juga terlebih dahulu mengisi formulir secara elektronik paling lambat jam 17.00 PM. Registrasi bunga yang akan dilelang itu meliputi Monetary Unit, Price per stem, number of trolleys, number of containers per trolley, Total amount of container, minimum amount of containers to be purchased. Para penjual juga mengemas bunga ke dalam box troli kemudian dimasukkan ke ruangan pendingin sebelum dilelang besok harinya. ▲



Info PLKA Acuan Harga Komoditi

Informasi harga pasar lelang selain menjaga stabilitas harga juga menjadi tolak ukur perdagangan komoditi di daerah lain.



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sejak awal tahun 2013 melalui website: bappebti.go.id, telah menampilkan penyelenggaraan pasar lelang komoditi agro (PLKA) dan realisasi transaksi para peserta dari 13 daerah. Informasi harga dan penyelenggaraan pasar lelang itu secara reguler di upgrade sesuai dengan jadwal pelaksanaannya. Dan seluruh informasi itu langsung diinput oleh 13 penyelenggara PLKA.

Selain menampilkan penawaran harga tertinggi dan terendah, informasi itu juga menampilkan lokasi serah fisik komoditi yang di lelang. Sehingga para pelaku komoditi dari daerah bersangkutan bisa langsung melakukan penawaran. Atau, informasi harga tersebut menjadi tolak ukur perdagangan di daerah lain.

Menurut Kepala Bagian Pengawasan Pasar Lelang, Bappebti, Pantas Lumban Batu, informasi PLKA tersebut sejak awal tahun 2013 telah ditayangkan dan ditujukan untuk memudahkan para pelaku pasar lelang melakukan penawaran komoditi dari 13 daerah penyelenggara PLKA.

“Informasi yang ada di website Bappebti itu merupakan salah satu program pembinaan terhadap pasar lelang. Sehingga pasar lelang diharapkan semakin berkembang dan memberi nilai tambah bagi pemerintah daerah dalam mendorong laju perekonomian lokal,” jelas Pantas.

Sebab itu, Bappebti berharap para

pelaku ekonomi terutama dari 13 daerah penyelenggara PLKA dapat memanfaatkan informasi tersebut. Atau pun, pelaku komoditi dari daerah lain dapat menjadikan harga tersebut menjadi acuan harga didaerahnya.

Informasi harga komoditi PLKA yang ditampilkan pada website Bappebti tersebut merupakan hasil transaksi dari lima besar dari setiap penyelenggaraan pasar lelang.

Selain 13 daerah penyelenggara PLKA tersebut, DKI Jakarta juga menjadi salah satu daerah yang berkontribusi memberi informasi harga komoditi. “Memang pasar lelang DKI Jakarta tidak lagi masuk dalam pembinaan Bappebti. Tetapi mereka tetap melakukan program pasar lelang, menurut informasi yang saya terima untuk tahun ini ada sebanyak empat periode penyelenggaraan.”

Lebih jauh dikatakan Pantas, misalnya pasar lelang Jawa Timur, di sana diselenggarakan lelang komoditi beras dan di informasi itu akan ditampilkan harga penawaran tertinggi dan terendah. Dengan demikian, pelaku pasar di daerah lain seperti di Jakarta dan sekitarnya, bisa melakukan perkiraan berapa besaran harga beras yang akan dijual atau pun akan dibeli dari sentra produksi.

“Dengan informasi harga itu, konsumen pun bisa memperkirakan harga beli komoditi beras sehingga tidak merasa tertipu dengan harga yang tinggi,” katanya.

Manfaat lain dari informasi harga itu jika digunakan para pelaku pasar akan menekan tingkat inflasi dari daerah bersangkutan. “Sebab, harga akan terkendali dengan persediaan komoditi di daerah itu. Atau, Pemda yang tidak memiliki komoditi seperti beras, dapat melakukan koordinasi dengan Pemda yang over suplai. Sehingga harga beras di daerah yang tidak memiliki persediaan bisa dikedalikan.”

“Kami juga berharap informasi harga komoditi dari pasar lelang itu tidak saja dimanfaatkan pelaku pasar, melainkan juga Pemda dalam rangkai stabilisasi harga komoditi pangan. Dengan demikian tingkat inflasi di daerah tersebut bisa dikendalikan,” terang Pantas.

Ditambahkan Pantas, informasi harga PLKA itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan analisis harga komoditi. Karena informasi harga itu akan terdokumentasi secara otomatis. “Dengan demikian kita bisa melakukan prediksi harga dan mengamati perilaku komoditi. Seperti, saat kapan harga komoditi di suatu daerah mengalami lonjakan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah persediaan. Atau, saat kapan harga komoditi rendah yang ditandai dengan adanya kelebihan pasokan.”

“Tentunya informasi itu belum sempurna seperti yang kita inginkan, tetapi Bappebti berharap informasi tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga tujuan dan manfaat pasar lelang dapat dirasakan para pelaku komoditi, terutama petani dalam memasarkan hasil panennya,” ujar Pantas.

Menurut Pantas, langkah Bappebti selanjutnya terkait informasi pasar lelang itu akan disosialisasikan ke berbagai daerah sehingga baik pelaku komoditi maupun petani bisa menjadikannya sebagai acuan harga jual.

“Pastinya Bappebti tidak akan berhenti sampai di situ, dan kami senantiasa akan mengembangkan informasi pasar lelang itu dalam rangka pembinaan,” imbuh Pantas Lumban Batu. ▲



Agenda Foto



Mendag, Gita Wirjawan, mengunjungi dan memberikan pengarahan kepada pegawai Bappebti. Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri para pejabat Eselon I Ibu Plt. Kepala Bappebti, Bpk Sekretaris Jenderal, Bpk Inspektur Jenderal, dan para pejabat Eselon II dari Bappebti, Eselon II Inspektorat Jenderal serta seluruh karyawan Bappebti. **Jakarta, 14 Mei 2013.**



Sekretaris Bappebti Robert J. Bintaryo mewakili Plh Kepala Bappebti membuka Penataan dan Penyegaran Wakil Pialang Berjangka. Tujuan Penataan dan Penyegaran Wakil Pialang Berjangka adalah dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan profesionalisme SDM Wakil Pialang Berjangka yang telah lebih dari tiga tahun memiliki izin dari Bappebti. **Yogyakarta, 15-16 Mei 2013.**



Sekretaris Bappebti, Robert J. Bintaryo mewakili Plh Kepala Bappebti membuka Pertemuan Teknis Ketentuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komodit. Materi yang disampaikan meliputi Ketentuan atas Perilaku Pialang Berjangka, Pemahaman Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan yang mencurigakan di Bidang PBK. **Balikpapan, 20-21 Mei 2013.**



Plh. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Ibu Nus Nuzulia Ishak mengunjungi PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) didampingi Kepala Biro Perniagaan Bappebti Sri Nastiti Budianti dan Kepala Biro Analisis Pasar Bappebti Mardjoko. **Jakarta, 29 Mei 2013.**



Plh Kepala Bappebti, Nus Nuzulia Ishak memberikan pengarahan pada acara pelepasan peserta diklat calon PPNS Bappebti yang dilaksanakan di Gedung Bappebti. Dalam pengarahannya Plh Kepala Bappebti mengharapkan dengan adanya Calon PPNS Bappebti yang baru akan dapat meningkatkan pengawasan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. **Jakarta, 13 Mei 2013.**



Sekretaris Bappebti, Robert J. Bintaryo memberikan pengarahan pada acara Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka. Peserta yang mengikuti Ujian Profesi tersebut berjumlah 108 orang yang berasal dari Jakarta, Solo, Yogyakarta, Bandung, Purwokerto, Surabaya dan Papua. **Semarang, 31 Mei 2013.**



Industri PBK Harus Berbenah Diri



Industri perdagangan berjangka komoditi yang berkembang dan dapat disejajarkan dengan industri sejenis di luar negeri, akan tercermin dari sumber daya manusia- SDM yang profesional. Perkembangan industri yang diiringi dengan perkembangan peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi, menuntut SDM dari pelaku pasar mengasah kemampuannya baik di bidang peraturan maupun teknis perdagangan berjangka komoditi.

Selain itu, meningkatkan kemampuan SDM perdagangan berjangka komoditi di tanah air, akan memperkuat posisi

para pelaku pasar di era ASEAN Economic Community (AEC) yang berlangsung pada tahun 2015 mendatang.

Demikian dikatakan Sekretaris Bappebti, Robert J. Bintaryo, pada pembukaan penyegaran Wakil Pialang Berjangka (WBP), di Yogyakarta, 15 Mei 2013 lalu. Penyegaran itu diikuti dengan ujian profesi bagi WPB yang telah memiliki izin minimum tiga tahun. Ujian profesi itu diikuti sebanyak 175 WPB yang berasal dari sebanyak 37 perusahaan pialang berjangka di wilayah Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Makassar.

“WPB yang telah memiliki izin lebih dari tiga tahun diwajibkan kembali untuk mengikuti ujian profesi dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan mereka di bidang peraturan dan teknis perdagangan berjangka komoditi,” jelas Robert.

Lebih jauh dikatakan, praktik-praktik ilegal perdagangan berjangka komoditi terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat dan adanya upaya manipulasi yang dilakukan oknum pelaku pasar. “Pada hal seharusnya, para pelaku pasar itulah yang mengedukasi masyarakat. Sebab, mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” kata Robert.

Sementara itu, Robert mengingatkan, industri perdagangan berjangka komoditi harus berbenah diri. “Padahal tahun 2015 nanti, ASEAN Economic Community (AEC) sudah diberlakukan. Jadi, jika SDM perdagangan berjangka kita tidak profesional dan berkembang, bukan mustahil yang dari luar akan menguasai industri ini,” ujar Robert J. Bintaryo. ▲

Kerjasama RI-Malaysia Stabilisasi Harga CPO

Salah satu solusi menekan tingkat kerugian akibat melemahnya harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional adalah mendorong peningkatan konsumsi di dalam negeri dengan dikembangkannya industri hilir. Selain itu, Kementerian Pertanian Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia sebagai produsen CPO kedua terbesar di dunia.

“Untuk menstabilkan harga CPO di tingkat internasional, pemerintah akan terus bekerjasama dengan Malaysia sebagai produsen terbesar dunia. Indonesia dan Malaysia sebagai produsen CPO menguasai hampir 85 % pasar dunia,” jelas Menteri Pertanian, Suswono, di sela-sela penyelenggaraan International Conference & Exhibition on Palm Oil 2013, di Jakarta.

“Dalam beberapa hal memang kita sering ada kesalahpahaman, tapi terus dibangun kerjasama. Setiap tahun ada pertemuan bilateral, dan salah satu topiknya adalah sawit,” ujar Suswono.

Lebih jauh dikatakan Suswono, alternatif lain mengantisipasi penurunan harga CPO di pasar internasional yakni konsumsi di dalam negeri di tingkatkan melalui hilirisasi. “Dengan hilirisasi itu nantinya ekspor lebih banyak dalam bentuk produk turunan yang memiliki nilai tambah.”

Sementara itu menurut Suswono, salah satu penyebab rendahnya produksi CPO nasional saat ini disebabkan belum optimalnya produktivitas perkebunan sawit rakyat. “Untuk itu pemerintah memprogramkan peremajaan atau replanting terhadap tanaman sawit yang sudah tua, serta memberikan bantuan

benih bagi program tersebut.”

“Agar perkebunan rakyat dapat mengikuti produktivitas perkebunan besar, juga diperlukan pemeliharaan yang intensif, pemupukan serta penerapan good agriculture practice-(GAP. Selain itu, meningkatkan daya saing dan nilai tambah CPO melalui pengembangan industri hilir di dalam negeri,” tandas Suswono. ▲





49 % Saham Bakal Dilepas ke Anggota KBI

PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dijadwalkan semester pertama tahun 2013 melepas sahamnya kepada sebanyak 15 anggota kliring, 15 Anggota kliring tersebut akan menguasai maksimal 49 % saham KBI.

Dirut KBI, Tris Sudarto, mengatakan, persetujuan penjualan saham KBI itu tinggal menunggu keputusan dari Kementerian BUMN.

“Jika persetujuan dari Kementerian BUMN sudah ke luar, secepatnya akan kami proses penjualan saham KBI. Tetapi kami perkirakan pertengahan tahun ini sudah resmi saham KBI dimiliki anggota kliring, Atau, selambat-lambatnya awal semester kedua 2013,” jelas Tris Sudarto.

Lebih jauh dikatakan Tris Sudarto, sebanyak 15 anggota KBI tersebut merupakan anggota aktif bursa ber-



jangka komoditi Jakarta Futures Exchange (JFX). “Pada tahun 2012 lalu, volume transaksi 15 anggota KBI itu menguasai 54 % pangsa pasar perdagangan berjangka JFX.”

“Masuknya anggota kliring sebagai pemegang saham dipastikan akan me-

ingkatkan utilitas KBI. Di samping itu, perusahaan pialang berjangka atau pedagang berjangka pemegang saham KBI semakin terpacu untuk melakukan transaksi perdagangan berjangka khususnya kontrak berjangka multilateral,” imbuh Tris Sudarto. ▲

JFX Incar Pasar Fisik Kedelai, Kakao, Kopi dan Olein

Jakarta Futures Exchange (JFX) rencanakan semester II 2013 perdagangkan kontrak komoditi kedelai. Upaya itu untuk stabilisasi harga komoditi kedelai yang merupakan bahan pokok utama masyarakat Indonesia. Di samping itu, JFX ingin membuktikan teori bahwa pasar konsumen yang menentukan harga komoditi.

“Kami sudah mengajukan proposal perdagangan kontrak komoditi kedelai ke pihak otoritas. Diharapkan dalam waktu dekat bisa selesai dikaji sehingga semester II nanti kontrak komoditi kedelai bisa diperdagangkan JFX,” demikian dikatakan Dirut JFX, Sherman Rana Kreshna.

Kami termotivasi memperdagangkan kontrak kedelai karena komoditi tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, tambah Sherman. Di sisi lain, volume impor ko-

moditi kedelai cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri yakni sekitar 800.000 ton. “Sedangkan produksi kedelai di dalam negeri nyaris sulit bersaing dengan negara produsen seperti Amerika, Brazil dan negara-negara Latin lainnya.”

“Kalau kita mau swasembada dan bersaing dengan negara-negara produsen kedelai, dibutuhkan lahan yang sangat luas. Serta diperlukan teknologi tinggi. Memang tidak mustahil Indonesia bisa swasembada kedelai, tetapi kondisionalnya harus mendukung,” jelas Sherman.

Lebih jauh dikatakan Sherman, kalau kita melihat perilaku tata niaga kedelai, Indonesia merupakan pasar impor. Hal itu terbukti, ketika terjadi kelangkaan impor harga kedelai di dalam negeri langsung melonjak tinggi.

“Itu artinya Indonesia merupakan pasar konsumen. ‘Nah, selama ini ada teori bahwa pasar konsumen bisa menentukan harga suatu komoditi dengan adanya pasar terorganisir di negara tersebut. Seperti misalnya negara-negara Eropa, di sana tidak ada satu pun pohon kakao, tetapi harga kakao dunia mengacu harga Eropa,” ujar Sherman.

Menurut Sherman, tahap awal direncanakan JFX akan memperdagangkan kontrak kedelai melalui mekanisme pasar fisik. Jika mekanisme itu berjalan sesuai dengan harapan maka akan diperdagangkan melalui perdagangan kontrak berjangka. Selain itu, JFX juga akan mengaktifkan kembali mekanisme perdagangan pasar fisik komoditi jagung, kopi, olein-minyak goreng dan kakao. ▲

CPO dan Batu Bara Angkat Neraca Perdagangan RI



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa meyakini tren neraca perdagangan Indonesia dapat berbalik arah ke level positif. Hal ini dipicu membaiknya harga sejumlah komoditas andalan Indonesia di pasar internasional.

“Ekspor Indonesia pada bulan Januari-Maret 2013 memang mengalami penurunan, karena tekanan harga komoditas dan merosotnya perdagangan ke Eropa. Tapi kan defisit neraca perdagangan tidak terlalu besar,” kata Hatta Rajasa, di Jakarta, 2 Mei 2013 lalu.

Meski demikian, Hatta mengungkapkan, tren neraca perdagangan bakal tumbuh seiring dengan derasnya investasi dan penurunan impor barang modal maupun barang konsumsi. “Tren pasti akan semakin bagus, karena saya yakin situasi ekspor komoditas Indonesia akan membaik sejalan dengan terangkatnya harga komoditas, seperti kelapa sawit dan batu bara. Sebab selama ini 50% perdagangan Indonesia dikontribusi dua komoditas tersebut,” harapnya.

Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor perdagangan periode Januari-Maret 2013 mencapai US\$ 45,46 miliar atau lebih kecil dari ekspor sebesar US\$ 45,39 miliar. Sehingga defisit perdagangan Indonesia sepanjang kuartal I-2013 mencapai US\$ 67,5 juta.

Ekspor Indonesia berdasarkan sektor yang mengalami penurunan, diantaranya pertanian menjadi US\$ 1,23 miliar, pertambangan US\$ 7,78 miliar, minyak dan gas sebesar US\$ 8,12 miliar.

Sedangkan peningkatan impor selama periode tiga bulan pertama ini dialami komoditas bahan baku yang naik dari US\$ 33,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu menjadi US\$ 34,91 miliar. ▲

Produksi Biji-bijian Diramal Naik Tahun Ini

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memprediksi produksi gandum, biji-bijian kasar dan beras sedunia diperkirakan naik pada tahun ini. Organisasi yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini berasumsi, kondisi cuaca lebih normal jika dibandingkan dari tahun 2012.

Faktor lainnya yang meningkatkan produksi adalah, beberapa negara produsen utama dari bekas Uni Soviet telah pulih dari kekeringan.

Produksi biji-bijian kasar, termasuk jagung, diperkirakan mencapai rekor baru sekitar 1,3 miliar ton. Hal ini berarti kenaikan 9,3 persen dari rekor sebelumnya pada 2011. Produksi jagung akan mencapai sekitar 960 juta ton meningkat sekitar 10 persen karena produksi dari Amerika Serikat mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 1936.

Produksi gandum global diperkirakan akan meningkat 5,4 persen dan bisa menjadi 690 ton. Rekor terbesar

adalah tahun 2011 yang mencapai 695 juta ton. Produksi beras akan naik 3,3 persen menjadi 497,7 juta ton karena proyeksi peningkatan besar di India dan Indonesia. ▲



Penjualan Emas Domestik Tumbuh 5 % per tahun



Asosiasi Pengusaha Perhiasan Emas dan Permata (Apepi), mengungkapkan, penjualan perhiasan dalam negeri melambat, hanya naik sekitar 5% per tahun. Hal itu seiring dengan perubahan daya beli masyarakat untuk memilih berinvestasi pada emas batangan, terutama dalam kurun 2 tahun terakhir.

“Menurunnya penjualan itu mengakibatkan semakin banyaknya perhiasan yang justru diekspor ke luar negeri,” kata Sekjen Apepi, Iskandar Husein, di Jakarta, 7 Mei 2013 lalu.

Menurutnya, pada masa sebelum krisis moneter, penjualan emas perhiasan ke luar negeri hanya sekitar 20% sementara 70% diantaranya diserap oleh pembeli lokal. Namun saat ini, kondisi justru terbalik, 70% penjualan ke ekspor sedangkan penjualan di dalam negeri hanya sekitar 20%.

Penurunan tersebut, kata Iskandar, karena konsumen emas tergerus dengan produk lain seperti kendaraan bermotor, properti, serta berbagai gadget. Selain itu, saat ini sebagian besar masyarakat membeli emas untuk berinvestasi dalam bentuk emas batangan.

“Dalam 2 tahun ini terjadi investasi di emas batangan, bagi industri perhiasan tidak menguntungkan. Kami dapat data dari Antam, daya serap emas batangan dalam negeri lebih dari 40 ton per tahun, sedangkan penjualan perhiasan kenaikan hanya 5%,” ungkap Iskandar. ▲



Commodity Futures Trading (PBK) participant has to be ready to compete in AEC era.



The Indonesian commodity futures trading industry that has been developed and can be aligned with same industry in overseas will be reflected from its professional man power source. The Industry development that was accompanied with the policy development in commodity futures trading sector required the man power from market executants to sharpen their ability both on policy sector and commodity futures trading technique.

“Increasing the commodity futures

trading man power ability will strengthen the position of market executants on ASEAN Economic Community (AEC) era that will be held in 2015,” one of the things that was said by Coftra Secretary, Robert J. Bintaryo, on the opening of Futures Broker Representative (WBP) refreshment in Jogjakarta, Wednesday 15th of May 2013.

“WBP who has license more than 3 years was required to re-take the professional exams. The aim is to measure their ability level on policy sector and futures trading technical.” Robert explained.

Furthermore it was said that illegal practices of commodity futures trading was happened because of the lack of society knowledge and an existing manipulation attempt that was done by individual market participants.

“Which ideally the market participant should educate the society because they are the one who dealing directly with the society.”

“Indonesia as a big nation among ASEAN countries should have a strong commodity futures trading industry. Singapore with its small area can have two commodity futures exchange. The same with Malaysia who become world price reference for CPO – crude palm oil commodity,” He said

“Recently we are still trying to clear the way and fix this industry. In 2015 AEC will operate it. If our futures trading man power are not professional and developed, it is not possible that outsider will take over this industry,” Robert J. Bintaryo added. ▲

Coftra Demanded the Fulfillment of Promises From Province Government of ACAM Executor

Jakarta Futures Exchange (JFX) will reactivate futures contract trading for coffee commodity that has been so quite in the last couple years. JFX President Director Sherman R, Khrisna said that the proposal for coffee contract is currently on finalizing stage. “The specification for this coffee contract will be much the same with the specification when it was launched for the first time in 2002.”

“This coffee contract will be revived as soon as possible therefore currently we are still preparing the specification first. This month it should be finished and submitted to Coftra,” He said.

Sherman explained that coffee contract was traded in JFX but it was not liquid. That is why then the coffee contract was pull out from the exchange. Therefore there is a possibility that the volume will be small so it can attract the beginner of market participants.

Currently coffee price at production center in the country is less favorable for the farmer as it still referring to foreign price. Which according to Sherman,



there are lots of domestic demands which should use local prices. In this kind of condition the role of price formation in the exchange is needed.

“The farmer or coffee trader should have not referred to London exchange price but referred to local exchange price. Most of the coffee producer sold their product at local market but the price was till referred to foreign market. This is not right,” He said.

Sherman added, imagine if our population is around 250 million and from that number around 35% likes to consume coffee. It means that the price of coffee producer should have been determined locally because the market is local.

“One of the key of success for coffee contract amongst the market participant is the presence of market maker because they are the one who offer the sell and buy price, so we are currently preparing its market maker,” Sherman explained. ▲

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN APRIL 2013

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Resi Gudang Terbit	Nilai Barang (Rp)	RG Diagunkan	Nilai Pembiayaan (Rp)	Bank/LKNB
1.	PT. PERTANI						
	- Cianjur *)	Gabah	9	208.687,5	7	518.800	Bank BJB
	- Probolinggo (Krasan) *)	Gabah	5	892.250	4	536.183	Bank JATIM
	- Makassar (Kospermindo)	Rumput Laut	1	528.000	1	277.200	Bank BJB
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	4	320.000	4	295.000	Bank BJB
	- Sidrap	Gabah	1	441.000	1	308.700	Bank BRI
	- Tuban *)	Jagung	5	149.050	3	66.000	Bank JATIM
	- Probolinggo (Banyuanyar)	Beras	3	448.500	2	193.200	Bank JATIM
		Gabah	2	356.900	1	150.500	Bank JATIM
	- Jombang (Perak) *)	Gabah	3	448.500	2	193.200	Bank JATIM
	JUMLAH	Gabah	22	2.278.837,5	17	1.809.183	
		Beras	3	448.500	2	193.200	
		Jagung	9	463.891	4	124.212	
		Rumput Laut	1	528.000	1	277.200	
	TOTAL		35	3.719.228,5	24	2.403.795	

*) Gudang milik Pemerintah Kabupaten/Kota
*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

PENERBITAN RESI GUDANG BULAN APRIL 2013

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga Rata-Rata (Rp/kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	PT. PERTANI					
	- Cianjur *)	Gabah	10	271,20	5.968	1.618.600.000
	- Probolinggo (Krasan) *)	Gabah	11	776,78	4.312	3.349.156.800
	- Makassar (Kospermindo)	Rumput Laut	1	24,00	10.500	252.000.000
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	31	593,75	5.000	3.229.875.000
	- Sidrap	Gabah	3	254,45	4.200	1.078.700.000
		Beras	1	30,20	6.200	187.240.000
	- Tuban *)	Jagung	3	38,20	3.400	129.060.000
		Gabah	1	8,00	4.500	36.000.000
	- Probolinggo (Banyuanyar)	Jagung	3	45,00	3.300	148.500.000
		Gabah	3	152,03	4.300	653.729.000
	- Jombang (Perak) *)	Gabah	2	32,25	4.300	138.675.000
	- Wonogiri *)	Gabah	3	35,00	4.200	147.000.000
	- Pinrang (Sudirman)	Gabah	1	126,00	4.200	529.200.000
	- Madiun (Muneng) *)	Gabah	1	20,00	4.300	86.000.000
	JUMLAH	Gabah	66	2.015,01	4.528	10.866.935.800
		Beras	1	30,20	6.200	187.240.000
		Jagung	6	83,20	3.350	277.560.000
		Rumput Laut	1	24	10.500	252.000.000
	TOTAL		74	2.152,41	24	11.583.735.800

*) Gudang milik Pemerintah Kabupaten/Kota
*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



INDIKATOR HARGA PLKA BULAN APRIL 2013

NO.	DERAH	KOMODITI	JENIS	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	GUDANG SERAH
1.	Bali / 19.04.2013	Kedelai	Kedelai	Rp. 6.850/Kg	Rp. 6.850/Kg	Kediri-Jatim
2.	Jambi / 04.04.2013	Karet	Leum	Rp. 13.000/Kg	Rp. 13.000/Kg	Jambi
3.	Bandung / 11.04.2013	Gula Pasir	Lokal	Rp. 10.800/kg	Rp. 10.800/kg	Jakarta
		Beras	IR 64 Super	Rp. 7.200/Kg	Rp. 7.200/Kg	Jakarta
4.	Semarang / 23.04.2013	Jagung	Hibrida	Rp. 3.200/Kg	Rp. 3.200/Kg	Jakarta
		Beras	IR 64 Medium	Rp. 6.600/Kg	Rp. 6.600/Kg	Bandung
5.	Surabaya / 23.04.2013	Sapi	Brahma	Rp. 30.000/Ekor	Rp. 30.000/Ekor	Surabaya
		Jagung	Pipilan	Rp. 2.950/Kg	Rp. 2.950/Kg	Nganjuk
		Beras	IR 64	Rp. 6.900/Kg	Rp. 7.300/Kg	Jakarta
6.	Mataram / 14.04.2013	Cengkeh	Lokal	Rp. 100.000/kg	Rp. 100.000/kg	Bangli
		Kopi	Robusta	Rp. 20.000/Kg	Rp. 20.000/Kg	Bangli
7.	Makassar / 29.04.2013	Kakao	Lokal	Rp. 20.200/Kg	Rp. 20.200/Kg	Gudang Penjual
		Rumput Laut	Cottoni	Rp. 11.500/Kg	Rp. 12.500/Kg	Gudang Penjual
8.	Manado / 16.04.2013	Coklat	Coklat Biji	Rp. 19.100/kg	Rp. 19.100/kg	Tondano
9.	Padang / 11.04.2013	Beras	Anak Daro	Rp. 8.500/Kg	Rp. 9.000/Kg	Padang

*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

TRANSAKSI PASAR LELANG

NO.	DAERAH	NILAI TRANSAKSI 2013	
		MARET	APRIL
1.	Sumatera Barat	365.192.000	1.419.120.000
2.	Jambi		5.308.880.000
3.	Lampung		
4.	Jawa Barat	12.585.250.000	9.331.750.000
5.	Jawa Tengah	2.714.000.000	10.530.000.000
6.	Yogyakarta	1.066.000.000	16.476.100.000
7.	Jawa Timur	4.082.100.000	25.400.000.000
8.	Bali		3.681.500.000
9.	NTB	1.019.900.000	1.236.400.000
10.	Sulawesi Utara	11.756.200.000	9.475.200.000
11.	Sulawesi Selatan		574.600.000
12.	Sulawesi Tenggara	2.075.850.000	
13.	Gorontalo		
TOTAL		35.664.492.000	83.433.550.000
GRAND TOTAL JANUARI - APRIL			184.537.842.000

10 BESAR KOMODITI PASAR LELANG PERIODE APRIL 2013

NO.	KOMODITAS	VOLUME/TON	TOTAL
1.	Beras	4.346	32.057.830.000
2.	Sapi	540	16.200.000.000
3.	Jagung	2.945	7.853.250.000
4.	Gula Pasir	400	4.220.000.000
5.	Ikan	176	3.703.900.000
6.	Kedelai	500	3.425.000.000
7.	Vanili	10	3.000.000.000
8.	Minyak Goreng	17.700	1.613.600.000
9.	Karet	120	1.560.000.000
10.	Kulit Manis	134	1.252.500.000

*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

SRG di Negara Berkembang



Indonesia. Komoditi rumput laut merupakan salah satu dari 10 jenis komoditi subjek SRG.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa SRG dapat membantu para petani, dengan menyimpan barang di gudang sampai harga naik dan menggunakan barang tersebut sebagai jaminan kredit sehingga petani dapat memperoleh dana sebelum menjual barangnya. Istilah Warehouse Receipt (WR) atau Resi Gudang telah secara baku diterapkan di dunia internasional, yaitu sebagai negotiable instrument dalam transaksi perdagangan berjangka komoditas. Penerapan SRG disambut positif di banyak negara berkembang, seperti di Afrika, dalam pembiayaan sektor pertanian.

Manfaat yang dapat diambil terutama dalam hal menjaga stabilitas harga produk pertanian yang dikenal musiman dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Para petani dapat terbantu memperoleh modal kerja dan mendapat jaminan penjualan hasil panennya dengan tingkat harga yang memadai. Penerapan SRG juga dapat mendukung sistem pengendalian sediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti beras.

Di **Amerika Serikat**, skim

pembiayaan dengan instrumen Resi Gudang sangat berkembang dalam mendukung sektor pertanian. Pemerintah bertindak sebagai penjamin atas penerbitan Resi Gudang.

Beberapa negara lain yang sudah menjalankan program SRG antara lain adalah India, Uganda, Polandia, Nigeria, Tanzania dan Ghana. Di negara-negara tersebut SRG telah memberikan pengaruh besar bagi sektor pertanian maupun perbankan. Penerapan Resi Gudang di negara-negara itu dilatarbelakangi permasalahan yang sama dengan yang dihadapi petani di Indonesia, yaitu petani terbiasa menjual hasil pertaniannya saat panen raya meski saat itu harga anjlok, karena memerlukan uang tunai untuk membayar biaya sekolah anak-anak, membayar gaji buruh dan membeli kebutuhan masa tanam berikutnya. Dengan SRG, petani bisa meminjam uang ke bank dengan jaminan hasil panen, sehingga dapat digunakan untuk membeli benih untuk masa tanam berikutnya.

Di **Uganda**, program SRG diformulasikan dalam Undang-Undang Sistem Resi Gudang yang disahkan parlemen pada tanggal 5 April 2006. Program ini sudah dimulai setahun

sebelumnya dengan pilot project Resi Gudang kopi di dua lokasi yakni, Uganda Barat dan Uganda Timur.

Setelah UU disahkan, Resi Gudang dilanjutkan dengan komoditas kapas. Untuk mempermudah, program ini juga dilengkapi dengan Sistem Informasi Pasar, layanan informasi komoditas, seperti fluktuasi harga. Informasi ini disebarkan melalui radio, koran gratis dan pesan singkat telepon seluler. Petani Uganda dimana pun berada dapat mengetahui harga kopi di pasar internasional dan nasional di lima lokasi berbeda dengan segera, sehingga petani bisa mengambil keputusan cepat dengan mengetahui kondisi harga di pasaran.

Namun tidak semua program Resi Gudang di Uganda berhasil. Pilot project Resi Gudang komoditas kopi arabika di Uganda Timur seperti Mbale, Sironko, Manafa dan Kapchorwa berjalan lambat karena iklim kering sempat merusak hasil panen kopi, dan pengelola program ini juga harus bersaing dengan pembeli lokal yang sangat agresif mendekati petani.

Tanzania juga memiliki konstitusi khusus yang mengatur SRG. Tanzania





India. Komoditi gandum dan gula merupakan komoditi yang dijamin petani dalam skema SRG.

membuat aturan operasional Resi Gudang yang lebih terperinci, termasuk pengembangan manual operasional dan pembentukan badan regulator. Dengan berbagai kebijakan itu, kepercayaan petani Tanzania terhadap program SRG terus meningkat, deposit hasil panen komoditas kapas dan angka Resi Gudang kopi juga meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan Resi Gudang ini berbanding lurus dengan peningkatan kredit perbankan di sektor pertanian.

Pengembangan Resi Gudang untuk komoditas kapas di Tanzania juga sempat terhambat karena biji

randu sering rusak karena minimnya jumlah mesin pemisah kapas. Untuk mengatasinya, Departemen Koperasi dan Pemasaran memberikan dana untuk membuka empat lokasi mesin pemisahan biji randu. Sejak itu, Resi Gudang telah menghasilkan efisiensi besar-besaran, dan kualitas komoditas meningkat.

Petani-petani di **Ghana** juga merasakan manfaat program Resi Gudang. Para petani bisa menjual panen mereka di masa panceklik sekitar 75-270 % lebih tinggi dari harga panen raya.

Sedangkan di **India**, Resi Gudang telah memacu industri perbankan dan sektor pertanian. Program ini bermanfaat meningkatkan manajemen risiko harga, mengurangi biaya transaksi dan biaya pemasaran sektor pertanian. Resi Gudang juga memainkan peran penting yang membuka peluang bagi India untuk berkompetisi di pasar pertanian dunia.

Pada negara-negara maju, Resi Gudang merupakan bagian dari instrumen keuangan yang dapat digunakan dalam bernegosiasi. Instrumen ini merupakan alat yang dapat berperan dalam masa transisi dimana pemerintah mulai mengurangi perannya dalam kebijaksanaan stabilisasi harga dan pemasaran komoditas menuju perdagangan komoditas yang didasarkan kepada mekanisme pasar. ▲



Ghana. Komoditi kakao salah satu subjek SRG.

Hambatan SRG di negara berkembang

- A.** Kurangnya insentif atau peluang bagi berkembangnya sistem pergudangan yang efisien yang diselenggarakan pihak swasta. Hal ini merupakan konsekuensi dari intervensi pemerintah dalam stabilisasi harga komoditas.
- B.** Masih kurangnya aspek legalitas yang integratif yang mendukung Resi Gudang sebagai instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan.
- C.** Kurangnya pemahaman dari sektor-sektor komersial tentang Resi Gudang sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan.
- D.** Fluktuasi tingkat bunga yang belum stabil, menyebabkan kurang menariknya sistem ini khususnya dukungan dari perbankan.



Manfaat Ekonomis Perdagangan Berjangka

Industri perdagangan berjangka di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 12 tahun. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami apa manfaat ekonomis perdagangan berjangka komoditi dan kontrak berjangka komoditi.

Berbeda dengan pengertian kontrak dalam perdagangan biasa, Kontrak Berjangka merupakan kontrak yang standar di mana jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar itu, maka yang di"negoisasi"kan hanya harganya saja. Performance atau "terpenuhinya" kontrak berjangka sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, dijamin oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kliring Berjangka.

Berdasarkan UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang kemudian berubah menjadi UU No. 10/2011, menyatakan perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya.

Perdagangan berjangka dilakukan di bursa berjangka, yang selanjutnya disebut dengan bursa, yang memperdagangkan kontrak berjangka berbagai komoditi. Tempat untuk memperdagangkan kontrak berjangka itu juga disebut pasar

berjangka.

Dengan demikian di bursa akan terdapat banyak pasar berjangka, sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu satu sama lain dan melakukan transaksi untuk membeli/menjual sejumlah komoditi untuk dikemudian hari, sesuai isi/spesifikasi kontrak.

Harga komoditi yang terbentuk di bursa, berlangsung secara transparan. Dengan demikian, harga tersebut akan mencerminkan kekuatan pasokan dan permintaan yang sebenarnya. Transaksi di bursa dilakukan oleh para anggota bursa, yang terdiri dari pialang berjangka dan pedagang berjangka, baik dengan cara berteriak (*open outcry*) atau secara elektronik (*authomated/electronic trading system*). Selanjutnya, harga yang terjadi dicatat menurut bulan penyerahan masing-masing kontrak berjangka, dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Dalam tahun-tahun terakhir ini, dan khususnya di bursa-bursa yang baru, sistem perdagangan umumnya dilakukan secara elektronik menggunakan komputer, yang memiliki akses ke komputer induk yang ada di bursa.



Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Ada dua manfaat utama dari penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (risk management) melalui kegiatan lindung-nilai atau “*hedging*”, dan sarana pembentukan harga (price discovery).

Pada dasarnya, harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut.

Dengan memanfaatkan kontrak berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian, pada harga yang telah dipastikan atau “dikunci” sekarang (sebelum panen). Dengan demikian, mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai.

Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli diluar negeri. Atau pengolah, yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan, karena transaksi hanya dilakukan oleh atau melalui anggota bursa, mewakili nasabah atau dirinya sendiri. Artinya, antara pembeli dan penjual kontrak berjangka tidak saling kenal atau mengetahui secara langsung.

Harga yang terjadi di bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (reference price) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Pada bagian pertama telah disinggung tentang pengertian perdagangan berjangka dan manfaatnya. Sekarang, marilah kita lihat uraian yang lebih jauh, berikut contoh kasusnya.

Komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa, adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, produk finansial serta jasa. Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas; menyangkut jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Dengan demikian, para pemakai/pengguna bursa bisa mudah melakukan transaksinya, sehingga akan terwujud pasar yang aktif dan likuid.

Para produsen, pengolah, pedagang, dan konsumen menggunakan kontrak berjangka sebagai alat untuk melindungi dirinya dari resiko fluktuasi harga. Pasar berjangka menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen, karena harga komoditinya dapat diprediksi dan ‘dikunci’ dengan baik.

Disamping ‘*hedger*’, yaitu pihak yang menggunakan kontrak berjangka untuk mengurangi resiko, di pihak sebaliknya disebut “*investor/spekulator*”, yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau spekulator biasanya membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah, dan menjualnya pada saat harga naik. Atau sebaliknya, menjual kontrak berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan, dan membelinya kembali pada saat harga rendah.

Praktiknya, kegiatan lindung nilai bisa dicontohkan sebagai berikut. Misalnya, seorang produsen gula mengharapkan dapat menjual gula yang akan dihasilkannya dalam waktu 2 atau 3 bulan mendatang. Produsen tersebut memperhitungkan bahwa untuk memperoleh keuntungan yang wajar, dia harus dapat menjual gula yang akan dihasilkannya pada harga US\$ 190 per ton. Harga di pasar berjangka untuk 3 bulan mendatang sebesar US\$ 204 per ton, menurut perhitungannya, cocok dengan harapannya.

Si produsen kemudian menggunakan jasa pialang berjangka untuk menjual sejumlah kontrak di pasar berjangka, yang ekuivalen dengan produk yang akan dihasilkannya untuk penyerahan bulan Mei pada harga US\$ 204 per ton. Pada akhir April, ketika si Produsen siap menjual gulanya, ternyata harga gula di pasar fisik turun menjadi US\$ 170 per ton. Sementara harga untuk penyerahan bulan Mei di pasar berjangka turun

menjadi US\$ 180 per ton.

Si produsen menjual gulanya di pasar lokal pada harga US\$ 170 per ton, dan pada saat yang sama menginstruksikan pada Pialangnya untuk membeli kembali sejumlah kontrak yang sama di pasar berjangka, untuk penyerahan bulan Mei pada harga US\$ 180 per ton. Berarti, si produsen sekarang memiliki kontrak jual pada harga US\$ 204 per ton dan kontrak beli pada harga US\$ 180 per ton, yang memberinya keuntungan sebesar US\$ 24 per ton di pasar berjangka. Keuntungan ini ditambahkan pada penerimaan yang diperoleh dari pasar lokal pada harga US\$ 170 per ton, sehingga harga jual sebenarnya menjadi US\$ 194 per ton.

Bila terjadi hal yang sebaliknya (harga naik), hasil akhirnya kurang lebih akan sama. Misalnya, harga di pasar lokal pada bulan Mei naik menjadi US\$ 210 per ton, sedangkan harga kontrak penyerahan Mei di pasar berjangka naik menjadi US\$ 220 per ton. Berarti si produsen menderita kerugian di pasar berjangka sebesar US\$ 16 per ton, sekaligus mengurangi hasil penjualannya di pasar lokal sebesar US\$ 210 per ton, menjadi sebesar US\$ 194 per ton sebagai harga akhir yang diterima.

Semua pengguna pasar berjangka, dipersyaratkan menyerahkan sejumlah uang yang di sebut “margin”. Besarnya per kontrak umumnya berkisar antara 5 % - 10 % dari nilai kontrak. Adapun besarnya margin berbeda-beda tergantung pada komoditi, waktu, dan gejolak harga yang terjadi.

Dalam perjalanannya, margin ini memerlukan tambahan (margin call), karena berkurang dari margin awalnya akibat pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula. Bila saldo margin mencapai batas tertentu, kepada setiap nasabah yang memiliki posisi “terbuka”, baik beli atau jual, harus menambahkan marginnya kebesaran semula (margin awal).

Margin yang telah ditetapkan berlaku untuk periode waktu tertentu, dan dapat diubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu ada biaya komisi yang dikenakan oleh pialang berjangka, yang besaran minimumnya ditetapkan bursa atas persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). ▲

Arman Arfah, Ketua Kosperindo

Mengabdi Bersama Gerakan SRG Rumput Laut



Arman Arfah merupakan tokoh muda gerakan koperasi di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Sebab itu, namanya tidak asing lagi dikalangan gerakan koperasi di Makassar. Sejak menyandang gelar sarjana ekonomi akuntansi tahun 1995, dia sudah malang melintang di dunia koperasi. Namun, sejak ayah dari tiga anak ini mengenal dan memahami manfaat ekonomis sistem resi gudang (SRG), dia pun jatuh cinta denan SRG dan gigih bersama gerakannya untuk memasyarakatkan instrumen pembiayaan pasca panen itu.

Menurut Arman Arfah, Ketua Umum Koperasi Perikanan Masyarakat Pesisir Indonesia (Kosperindo), SRG merupakan sarana penting di dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan penghasilan petani.

“SRG ini sangat ideal memberdayakan masyarakat. Dan yang terpenting lagi tidak tergantung dengan anggaran pemerintah. Hanya saja, pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur seperti pergudangan, alat pengering komoditi dan sarana pendukung lainnya. Jadi di sini- SRG murni bisnis, tetapi tetap masyarakat berpartisipasi aktif melalui koperasi,” jelas Arman.

Di samping itu, tambahnya, untuk implementasi SRG di daerah sangat tepat dilakukan dengan gerakan koperasi. “Sebab, bersama gerakan koperasi masyarakat bisa diberdayakan dan dibina baik dari sisi manajerial maupun menghasilkan produk berkualitas. Karena untuk mencapai skala ekonomis petani tidak mungkin mampu menghasilkan rumput laut dalam jumlah yang ideal masuk ke gudang SRG,” kata suami dari

Indriati Zulhanuddin, ini.

“Sebab itu, kami- Kosperindo dengan gigih mengembangkan SRG rumput laut di Kab. Bone, Kab. Luwuk Utara, Kab. Takalar dan Makassar. Di empat wilayah itu, masyarakat tidak saja dibina membudidayakan tanaman rumput laut, tetapi juga hasilnya akan dimasukan ke gudang SRG,” ujarnya.

Ditargetkan hingga akhir tahun 2013 Kosperindo sudah memiliki gudang di empat wilayah itu untuk menampung produksi petani dengan skema SRG. “Saat ini gudang Kosperindo yang ada di Makassar sudah bisa menampung rumput laut dan terdaftar sebagai gudang SRG. Gudang di Luwuk Utara saat ini dalam proses pembangunan, di Kab. Bone sedang dalam proses pengajuan izin sebagai gudang SRG. Sedangkan di Kab. Takalar, kami masih mencari



lokasi strategi. Tetapi diharapkan hingga akhir tahun ini empat lokasi itu sudah beroperasi.”

Arman ayah dari tiga anak ini menuturkan, Kospermindo sudah berkiprah sejak tahun 2002 mengembangkan industri rumput laut di tanah air. Ketika itu, Kospermindo mendapat dukungan dari salah seorang tokoh Sulsel yakni mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan dukungan itu, aktivitas Kospermindo membina dan memasarkan hasil produksi rumput laut petani Sulsel terus meningkat.

Tahun 2012 lalu, Kospermindo memasarkan lebih dari 170.000 ton rumput laut, dan sekitar 50 % diantaranya

kelahiran Bone, 09 Februari 1995 ini.

Sebab itu, saat ini Kospermindo pun memiliki obsesi jangka panjang untuk mendirikan industri pangan berbasis rumput laut di dalam negeri.

“Jika produksi kami sudah mencukupi dan ada modal, kami akan mendirikan pabrik berbasis rumput laut. Dengan demikian nilai tambah komoditi rumput laut semakin tinggi dan kita pun bisa ekspor produk rumput laut siap konsumsi,” harap Arman.

Arman Arfah, anak ketiga dari delapan bersaudara dari pasangan Muhammad Arfah dan ibunya yang Siti Zubaidin, mengakui perjalanan hidupnya banyak dipengaruhi dua tokoh yang

“
SRG ini
sangat ideal
memberdayakan
masyarakat
”



dipasarkan pada industri makanan di dalam negeri. Sedangkan sisanya di ekspor ke China, Taiwan dan Filipina.

“Kuncinya keberhasilan membina dan memberdayakan petani rumput laut itu sehingga menghasilkan dalam jumlah yang besar dan berkualitas adalah pembiayaan yang cepat dan murah, harga relatif stabil serta ada jaminan pemasaran,” terang Arman.

Karena itu, tambahnya, Kospermindo pun mendorong petani untuk menghasilkan rumput laut dengan kualitas terbaik. “Standarisasi produksi rumput laut itu sangat penting, sebab pada akhirnya petani akan diuntungkan jika bisa memenuhi kualitas yang diinginkan. Dan harganya pun pasti lebih baik.”

Harus diakui, geliat masyarakat

pesisir khususnya di Sulawesi Selatan membudidayakan rumput laut tidak lepas dari gerakan Kospermindo. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai program potensial ke masa depan. Diantaranya pada tahun 2010 lalu Kospermindo meluncurkan program GEMARI SEHAT (Gerakan Makan Rumput Laut Indonesia Sehat Berserat). Kegiatan itu pun mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan jumlah peserta mengkonsumsi berbagai jenis pangan rumput laut.

“Program itu merupakan salah satu upaya memasyarakatkan konsumsi rumput laut di dalam negeri. Karena selain berpotensi bisnis dan memberi penghasilan bagi petani atau nelayan pesisir, rumput laut juga memiliki kandungan gizi yang tinggi,” ujar pria

diidolaknya. Kedua tokoh nasional itu yakni mantan Menteri Koperasi dan UKM, Adi Sasono dan Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Saya harus akui, kedua tokoh itu memberi pengaruh positif sepanjang karier saya di gerakan koperasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya petani rumput laut. Dengan dua tokoh itu saya banyak berdiskusi dan jika saya ada kesempatan ke Jakarta, kalau tidak ketemu dengan dua tokoh itu saya merasa kurang bersemangat,” katanya.

Sebab itu, katanya, sampai kapan pun saya akan tetap ada digerakan koperasi. “Apalagi dengan adanya SRG ini, sangat mendukung gerakan koperasi dan menjadi salah satu solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani rumput laut.” ▲



*“Manfaatkan SRG
dan
Tingkatkan Kesejahteraan”*

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - BAPPEBTI
www.bappebti.go.id